

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandangan terhadap perempuan telah berubah seiring berkembangnya zaman, partisipasi perempuan dalam berbagai aspek semakin terlihat. Selain perannya menjadi seorang ibu dan istri, perempuan juga berperan di sektor publik. Terlepas dari budaya patriarki yang sampai saat ini masih belum sepenuhnya hilang, telah banyak gerakan-gerakan perempuan dalam melawan budaya patriarki tersebut, salah satunya yaitu gerakan feminisme. Pembahasan mengenai feminisme dan hukum tentang kesetaraan gender tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sosial yang lebih luas terutama di abad ke-20, seperti pembahasan mengenai perubahan pola partisipasi angkatan kerja, inovasi teknologi, perubahan ideologi sosial, termasuk ideologi gender. Perubahan-perubahan inilah yang sering memandu interpretasi konsep kesetaraan dan persamaan hak. Pada umumnya gender diperlakukan sebagai konstruksi sosial atau makna sosial yang diberikan pada perbedaan seksual biologis. Genderlah yang mendefinisikan peran, hak, dan tanggungjawab serta kewajiban perempuan dan laki-laki. Peran perempuan dan laki-laki selalu dimaknai dalam hal harapan sosial tentang perilaku yang sesuai untuk kedua jenis kelamin.

Menurut Mikolla dalam (Örtenblad et al., 2017) "*Females become women through a process whereby they acquire feminine traits and learn feminine behaviour*". Seorang perempuan memiliki sifat feminim melalui proses dimana mereka memperoleh sifat-sifat feminim dan mempelajarinya. Norma tidak ditentukan secara biologis tetapi diidentikan secara sosial. Dengan kata lain, seseorang menjadi laki-laki atau perempuan yang sesuai dengan harapan masyarakat dalam proses sosialisasi.

Menurut (Karwati, 2020) Adanya subordinasi gender terutama yang dialami kaum perempuan harus ditolak karena subordinasi akan menghambat laju pembangunan di bidang ekonomi bagi bangsa dan negara Indonesia. Di Indonesia peraturan mengenai kesetaraan gender telah diatur dalam *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* dan Instruksi Presiden/INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan penguasaan terhadap proses pembangunan. Hal ini dapat ditandai dengan semakin banyak perempuan dewasa yang terlibat dan ikut serta dalam pembangunan baik itu pada bidang ekonomi, politik, ataupun pendidikan. Selain itu dapat ditandai dengan banyaknya perempuan dewasa yang ikut serta dalam berbagai organisasi sebagai salah satu bentuk usaha untuk mencapai pembangunan yang telah ditetapkan.

Partisipasi perempuan yang semakin meningkat dalam sebuah organisasi memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yang mendukung seperti meningkatnya kesempatan pendidikan bagi perempuan, meningkatnya kebutuhan ekonomi, dan juga kemajuan teknologi yang memungkinkan perempuan untuk mengatasi masalah keluarga dan kebutuhan organisasi sekaligus. Menurut (Hartati, 2017) Keputusan perempuan dalam mempertimbangkan keikutsertaan pada sebuah organisasi tentu tidak mudah karena terdapat konsekuensi yang besar bagi kehidupan selanjutnya. Pada masa ini perempuan memiliki pemikiran yang cukup luas dan lebih terbuka mengenai permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi sehingga membuat mereka terdorong untuk membentuk suatu organisasi dan ikut serta secara aktif dalam menjalankan program organisasi yang diikutinya. Prilaku tersebut berkaitan dengan proses perkembangan yang dialami oleh perempuan melalui lingkungan dan stimulasi sosial yang membentuknya, termasuk keluarga yang menjadi tempat utama terbentuknya dasar pemahaman peranan gender melalui pola asuh orang tua terhadap anaknya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Isnaeniyah, 2017) mengenai peran perempuan saat bergabung dengan organisasi perempuan Islam Indonesia atau yang sering dikenal dengan Muslimat NU, organisasi ini banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan perempuan di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat secara internal dan juga eksternal. Namun hal yang terjadi justru perempuan masih dianggap lemah dan memiliki kemampuan yang terbatas. Pemikiran ini didasari oleh perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan terbentuknya pola konstruksi sosial yang berpandangan bahwa perempuan sebagai ibu rumah tangga yang hanya menjalankan peran domestik dan laki-laki sebagai pencari nafkah. Padahal dalam kenyataannya partisipasi perempuan dalam program kesejahteraan merupakan prinsip dasar namun sulit dilaksanakan karena adanya kesenjangan gender dalam banyak budaya masyarakat.

Menurut data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik di Indonesia pada tahun 2017 terdapat 40 organisasi perempuan yang bergerak di berbagai bidang yang dapat berdampak pada peningkatan kualitas hidup, penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di tingkat nasional dan daerah. Namun hal tersebut masih pencapaian yang belum cukup besar mengingat masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan termasuk meningkatnya kasus kekerasan yang disebabkan oleh terjadinya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya, terutama di tatanan antar provinsi dan antar kabupaten atau kota, rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi, serta rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit.

Dibalik dampak yang cukup besar untuk perubahan dari partisipasi aktif perempuan dalam suatu organisasi, partisipasi aktif tersebut juga berdampak terhadap keharmonisan keluarganya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik di Indonesia pada tahun 2021 terdapat 447.743 kasus perceraian terjadi di Indonesia dengan penyebab yang beragam diantaranya perselisihan,

ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami. Dari banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Indonesia, Jawa Barat menempati peringkat pertama dalam angka perceraian tertinggi dengan jumlah perceraian sebanyak 98.088 kasus. Sedangkan Kota Tasikmalaya juga memiliki angka perceraian yang cukup tinggi dengan jumlah rata-rata 160 kasus perbulan dan total terdapat 1.926 kasus perceraian pada tahun 2021 di Kota Tasikmalaya.

Menurut (Wijayanti, 2016) konflik peran ganda merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan. Peran ganda yang dimaksud adalah peran lain yang diemban oleh perempuan selain peran utama di keluarga yaitu sebagai istri dan ibu. Peran lain tersebut bisa dalam pekerjaan atau peran pada sektor sosial lain seperti dalam berorganisasi. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan diperoleh bahwa semakin tinggi konflik peran ganda maka semakin rendah kepuasan pernikahannya. Rendahnya tingkat kepuasan pernikahan inilah yang menjadi salah satu pemicu perceraian dalam rumah tangga.

Untuk mengurangi konflik peran ganda yang tinggi maka dukungan keluarga dalam menjalankan peran ganda tersebut sangat diperlukan. Menurut (Utaminingsih, Alifiulahtin. Maskan, 2018) dukungan sosial yang tinggi pada perempuan kerja mampu menurunkan konflik kerja dan konflik keluarga. Hal ini berkaitan dengan peran aktif perempuan dalam sebuah organisasi tentunya tidak terlepas dari dukungan keluarga yang merupakan subsistem dari masyarakat yang memiliki struktur sosial dan sistemnya sendiri. Sebagai sub sistem dari masyarakat, keluarga memiliki fungsi yang strategis dalam menanamkan nilai kesetaraan pada setiap aktivitas dan pola relasi antar anggota keluarga yang terdapat struktur, peran, dan fungsi sebuah system. Keluarga merupakan lingkungan yang memiliki pengaruh cukup besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan di ranah publik.

Apabila keluarga seperti suami dan anak-anak memberikan dorongan dan dukungan secara penuh untuk berperan aktif pada kegiatan sosial dan terlibat dalam organisasi tertentu. Berbeda halnya dengan keluarga yang kurang mendukung keputusan seorang perempuan untuk ikut serta dan berperan aktif di bidang sosial

termasuk ikut serta dalam organisasi yang justru akan menimbulkan berbagai konflik dalam keluarga dan berpengaruh terhadap keharmonisan dalam keluarga.

Tim Penggerak PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) merupakan lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memberdayakan perempuan agar turut berpartisipasi dalam pembangunan dan kesejahteraan keluarga. Dalam melaksanakan programnya dibentuk empat kelompok kerja atau Pokja yang memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing diantaranya; Pokja I memiliki tanggungjawab dalam program penghayatan dan pengamalan Pancasila, Pokja II bertanggungjawab dalam melaksanakan program pendidikan dan keterampilan, Pokja III bertanggungjawab dalam program sandang, dan Pokja IV bertanggungjawab dalam program kesehatan.

Permasalahan yang sering dialami oleh perempuan yang ikut serta dalam organisasi yaitu adanya anggapan perempuan sebagai pencari nafkah tambahan di keluarganya yang menyebabkan setiap aktivitas yang dilakukan diluar tanggungjawab sebagai peran domestik dalam keluarga harus berprestasi. Selain itu, masih adanya tekanan dari suami terhadap istri atau perempuan yang harus mementingkan peran domestik dan tidak mengharuskan bekerja yang berakibat juga terhadap rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Padahal program kerja yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK ini bertujuan untuk memaksimalkan masyarakat dalam mencapai kebutuhannya.

Dengan adanya hal-hal tersebut peneliti tertarik untuk menjadikan Tim Penggerak PKK ini sebagai objek penelitian karena dengan beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi tersebut juga berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga anggotanya. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perempuan yang ikut serta dalam organisasi terhadap keharmonisan keluarganya. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul penelitian yaitu : **“Pengaruh Perempuan Aktif Organisasi terhadap Keharmonisan Keluarga”** yang dilaksanakan pada Pengurus Tim Penggerak PKK di Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Adanya anggapan bahwa perempuan hanya berperan dalam urusan domestik di keluarganya.
- 1.2.2 Peran ganda perempuan yang sudah berkeluarga berpengaruh terhadap keharmonisan di keluarganya.
- 1.2.3 Perempuan yang aktif berorganisasi tidak selalu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh Perempuan Aktif Organisasi terhadap keharmonisan keluarga pada perempuan yang aktif sebagai Pengurus Tim Penggerak PKK di Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya?.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk menganalisis pengaruh perempuan aktivis organisasi terhadap keharmonisan keluarga pada pengurus Tim Penggerak PKK di Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis serta kegunaan secara praktis.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

1.5.1.1 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu pengetahuan khususnya mengenai peran perempuan aktivis organisasi

1.5.1.2 Dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1.5.2.1 Bagi Peneliti

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perempuan aktivis organisasi terhadap keharmonisan keluarga.

1.5.2.1 Bagi Perempuan Aktivis Organisasi

Penelitian ini berguna bagi perempuan yang berperan aktif berorganisasi untuk tetap menjaga keharmonisan keluarganya.

1.5.2.2 Bagi Anggota Keluarga

Penelitian ini dapat mengetahui seberapa besar pengaruh perempuan yang berorganisasi terhadap keharmonisan keluarga sehingga anggota keluarga yang lain dapat memahami dan menyesuaikan agar keharmonisan keluarga tetap terjaga.

1.6 Definisi Operasional

Penulis menetapkan batasan istilah definisi operasional agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah dari pembahasan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1.1.1 Perempuan Aktivis Organisasi

Perempuan aktivis organisasi merupakan perempuan yang berperan aktif dan selalu berpartisipasi dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Dalam menjalankan perannya sebagai aktivis organisasi tentu tidak terlepas dari peran utamanya dalam keluarga yaitu sebagai istri dan ibu. Sebagai perempuan aktivis organisasi sekaligus istri memerlukan kemampuan manajemen peran keduanya dengan seimbang antara menjalankan peran sebagai istri yaitu memenuhi kewajiban istri kepada suami, menjalankan peran istri dengan baik, menjaga kehormatan keluarga, dan menjalankan peran domestik dengan tetap memberlakukan pembagian tugas untuk anggota keluarga yang lain. Sebagai perempuan aktivis organisasi sekaligus ibu juga memerlukan kemampuan manajemen peran yang baik karena sebagai ibu, perempuan memiliki tanggungjawab yang penting terutama dalam mendidik anak.

Poin penting dari perempuan aktivis organisasi adalah kemampuan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam berorganisasi dengan ikut serta dalam proses perancangan program kerja organisasi dan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan organisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan perempuan aktivis organisasi memerlukan manajemen waktu yang baik dan menentukan skala prioritas serta komunikasi yang baik dengan keluarga. Perempuan aktivis organisasi juga memerlukan dukungan dari keluarga, hal ini sangat penting karena jika keluarga tidak mendukung maka perempuan tersebut tidak bisa berpartisipasi aktif dalam organisasi. Dukungan yang diberikan bukan hanya dalam bentuk mengizinkan untuk sering berada di luar rumah karena urusan organisasi tapi juga berupa memberikan pengertian atas kesibukan yang dijalani.

1.1.2 Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga adalah keadaan yang harmonis dalam keluarga ditandai dengan adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan dan ikatan yang erat antar anggota keluarga, terpenuhinya kebutuhan dalam keluarga, komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai antar sesama anggota keluarga, dan kualitas serta kuantitas konflik yang minim. Keadaan harmonis yang diinginkan didapatkan dengan menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga dan saling mengingatkan antar anggota keluarga. Kemudian hubungan yang erat didapatkan dengan saling menyayangi dan memperhatikan dengan anggota keluarga. Terpenuhinya kebutuhan dalam keluarga terutama terjaminnya kesehatan jasmani, rohani, dan sosial. Komunikasi yang baik dengan anggota keluarga ditandai dengan intensitas komunikasi yang dilaksanakan, adanya waktu khusus untuk keluarga dan mampu menyampaikan pendapat yang baik, memahami pendapat anggota keluarga agar tidak terjadi konflik yang berat dalam keluarga.